

Pelajaran dari

ADA BEBERAPA PELAJARAN SEJARAH NASIONAL yang dapat kita petik dari gejala maraknya spanduk "Mega-bintang" dan reaksi sejumlah elite politik di Tanah Air terhadap gejala itu. Gejala Mega-bintang tidak dengan sendirinya menunjukkan kehebatan Megawati Soekarnoputri ataupun kehebatan PPP yang berlambang bintang. Keduanya hanya bisa menjadi sebuah kekuatan yang besar secara mendadak berkat kehebatan pihak lain di luar mereka.

Dalam dirinya sendiri, PPP tak cukup kuat menghadapi dominasi Golkar. Tapi, seminggu yang lalu, Jakarta digebrak dalam kampanye PPP berslogan Mega-bintang. Dalam skala berbeda, gejala serupa marak di sejumlah tempat lain di Tanah Air. Jelas, itu berkat suntikan besar dari kekuatan eksternal. Tapi, kekuatan eksternal itu sebenarnya tidak bersumber dari tokoh karismatis bernama Megawati. Kekuatan itu datang dari mereka yang untuk sementara ini mendaulat Megawati sebagai tokoh idola terbesar dua tahun belakangan ini.

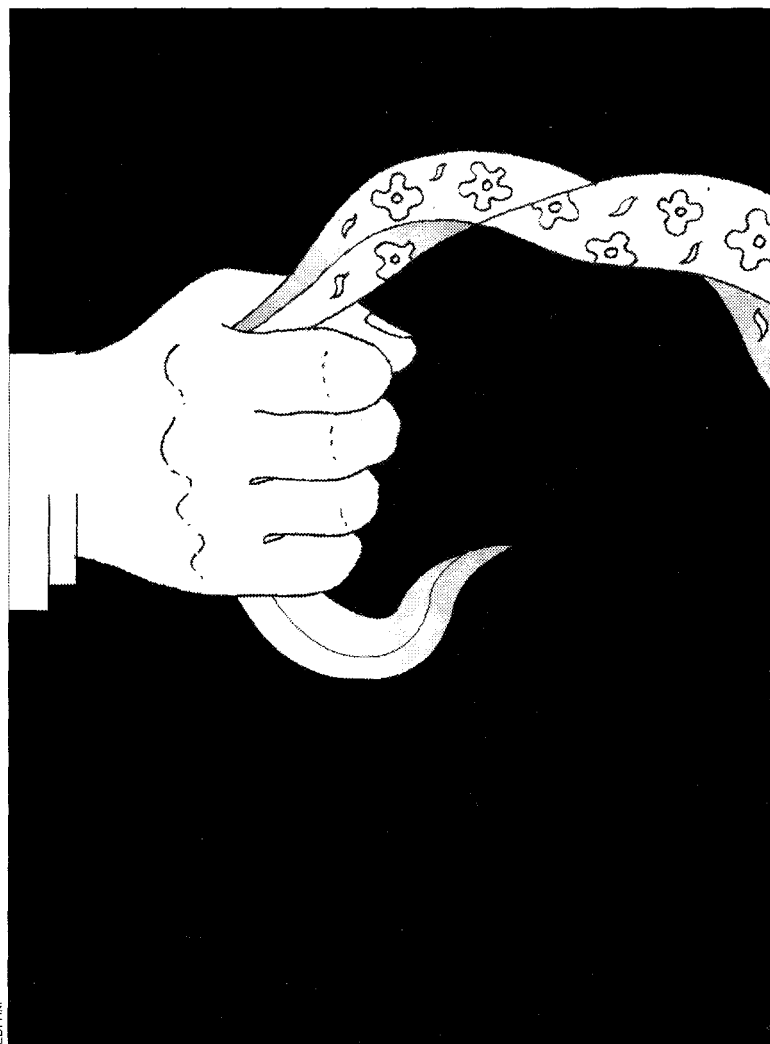
Dalam dirinya sendiri, Megawati dan PDI tidak jauh lebih perkasa daripada PPP. Peran Megawati dan partainya selama bertahun-tahun tidak jauh lebih banyak daripada aksesori dalam bilik Demokrasi Pancasila. Tapi, sejak akhir tahun 1993, Megawati dan PDI mendadak menjadi ancaman terhadap *status quo* dan dominasi elite Orde Baru. Paling tidak begitulah pandangan pihak yang berkuasa. Persis seperti pandangan mereka terhadap PPP berbendera Mega-bintang seminggu ini.

Perubahan kekuatan Megawati dan PDI bukanlah akibat pertumbuhan kekuatan dari dalam dirinya sendiri. Mereka adalah pihak-pihak yang kejatuhan bala bantuan besar. Hal itu tampak semakin jelas pada tahun lalu, terutama dalam beberapa minggu sebelum markas besar PDI diserbu oleh, konon, Operasi Naga Merah.

Siapakah kekuatan luar yang hampir secara mendadak membesarkan PDI di bawah Megawati itu? Sebagian dapat disebutkan karena punya nama dan wibawa besar. Di antaranya adalah Partai Rakyat Demokratik, koalisi sejumlah 30 organisasi prodemokrasi yang menyebut diri Majelis Rakyat Indonesia, dan sejumlah individu lain (termasuk Gus Dur dan R.O. Tambunan). Tapi, itu hanya sebagian kekuatan simpatik yang paling mudah difoto dengan kamera intelijen dan diwawancarai wartawan dalam dan luar negeri.

Sebagian besar wartawan Indonesia dan mancanegara itu sendiri telah berjasa besar dengan kerja profesional mereka meliput habis-habisan nasib Megawati dan PDI. Para wartawan itu bekerja dengan risiko tinggi, mempertaruhkan keselamatan fisik maupun karirnya. Dengan cara yang ironis, ucapan dan sepak terjang sebagian pejabat pemerintah juga telah berjasa membesarkan mitos-mitos di seputar Megawati dan PDI. Dengan melecehkan dan merongrong kekuatan Megawati/PDI secara vulgar tanpa memusnahkannya, mereka justru menumbuhkan simpati massa bagi Megawati/PDI.

Sebagian dari kekuatan eksternal yang lain tidak mudah disebutkan karena berbagai alasan. Ada yang masih bekerja sebagai pegawai negeri (entah sipil, entah militer), yang mendukung pemompaan kekuatan PDI di bawah Megawati. Mereka bergerak diam-diam demi keamanan karir dan perhitungan jangka panjang.



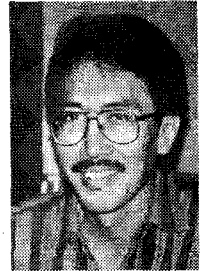
Sebagian lain sulit disebutkan karena memang tak berbentuk dan tak punya nama. Istilah paling dekat yang selama ini populer untuk mereka adalah "arus bawah". Kelompok itu tampaknya yang paling berjasa terhadap dinamika politik Indonesia pada lima tahun belakangan ini. Mereka tampaknya yang menjadi kreator Mega-bintang.

Yang jelas, maraknya kekuatan berspanduk Mega-bintang bukan hasil usaha atau kerja keras Megawati Soekarnoputri. Tidak juga hasil jerih payah PPP. Gejala Mega-bintang merupakan hasil kerja keras arus bawah yang tak diundang Mega atau pimpinan PPP. Tidak juga mereka sewaktu-waktu dapat dikendalikan mereka. Arus bawah itu punya kemauan dan kekuatan sendiri.

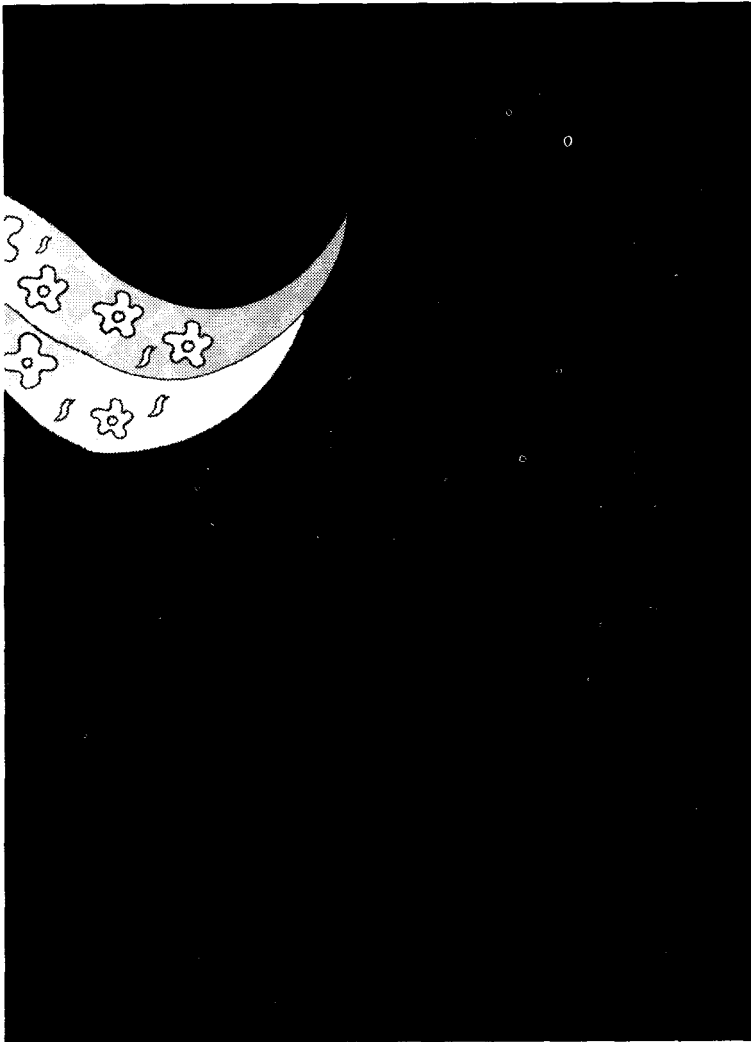
Pelajaran pertama dapat kita petik dari situ. Kekuatan oposisi yang selama 30 tahun telah diapolitisasi ternyata jauh lebih kenyal dan dahsyat daripada yang selama ini diperkirakan kaum elite penguasa. Kekuatan mereka kenyal berkat jasa "depolitisasi":

Diunduh dari <arielheryanto.wordpress.com>

Mega-Bintang



Ariel Heryanto *)



mereka tidak bermarkas di satu partai dengan satu markas dan alamat yang dapat diserbu dengan operasi naga apa pun. Dalam istilah yang pernah dipopulerkan elite militer, kekuatan itu "tak berbentuk".

Hari ini, mereka bisa berumah di PDI. Bila PDI diserbu, mereka boyong ke PPP. Bila PPP bermasalah, mereka dengan mudah bermigrasi ke Golput atau yang lain lagi—tanpa batas. Reaksi penguasa selama ini terhadap lembaga-lembaga yang mereka singgahi ibarat membakari gudang beras karena seekor tikus pernah lewat di situ.

Identitas mereka sulit dirumuskan secara terperinci. Mereka terdiri dari kumpulan orang dari berbagai usia, jenis kelamin, profesi, tingkat pendidikan, suku bangsa, atau agama. Seperti hantu bernama organisasi tanpa bentuk, mereka datang dan pergi tanpa jadwal yang jelas. Seperti Batara Narada atau awan berarak-arak.

Arus bawah itulah, dan bukan para tokoh aktivis prodemokrasi dari kelas menengah, yang mungkin paling radikal menjungkir-balikkan *status quo* di Ibu Kota selama beberapa puluh jam menyusul penyerbuan markas besar PDI. Mereka sulit dikendalikan siapa pun. Tidak juga oleh Megawati yang gambarnya mereka junjung di mana-mana—apalagi oleh aparat keamanan yang sering mereka jadikan sasaran amarah.

Pelajaran kedua yang dapat dipetik dari gejala Mega-bintang dapat dirumuskan begini. Bertolak belakang dengan indoktrinasi yang selama ini disebarluaskan ke mana-mana, rakyat Indonesia di lapisan paling bawah jauh lebih siap berdemokrasi daripada yang dituduhkan kepada mereka. Bahkan, mungkin lebih siap daripada rata-rata kelas menengah, apalagi kaum elite kekuasaan.

Dan, masih sehubungan dengan itu, boleh ditengarai bahwa masyarakat sipil lebih siap berpolitik dan memperbarui republik ini daripada yang selama ini dituduhkan terhadap mereka. Bahkan, mungkin lebih siap daripada pihak militer sendiri. Kesiapan itu sebelumnya tampak dari sambutan mereka terhadap rencana seminar tentang pidato Presiden Soekarno berjudul *Nawaksara*. Siapa yang ternyata kurang siap?

Pelajaran ketiga, dan mungkin yang terpenting, adalah berikut ini. Mengobrak-abrik sebuah partai yang berposisi loyal seperti PDI atau PPP jauh lebih mudah daripada mengendalikan kekuatan rakyat di lapisan bawah, yang sebenarnya menjadi aktor politik dan dalang utama yang sewaktu-waktu membesarkan atau meninggalkan kedua partai penggembira itu. Melarang atau menurunkan spanduk Mega-bintang jauh lebih gampang daripada menghadapi kekuatan yang menjadi kreator tenaga politik yang mengentak di balik benda mati berupa spanduk itu.

Elite kekuasaan dengan mudah dapat memenangkan pemilu seandainya lawan mereka hanyalah dua kontestan organisasi peserta pemilu bernama PDI dan PPP. Tapi, real politik Indonesia berlangsung di luar lembaga-lembaga formal yang "diakui resmi" oleh mereka yang merasa masih mempunyai kewibawaan, moralitas, dan wewenang untuk berbuat demikian.

Akhirnya, pelajaran terakhir dari gejala Mega-bintang dibebankan oleh reaksi dari sejumlah elite pemerintah, berupa larangan. Status hukum larangan yang hanya keluar dari penuturan pejabat semacam itu banyak digugat orang. Terlepas dari status legal larangan tersebut, reaksi keras semacam itu merupakan sebuah indikator tambahan tentang tingkat kepanikan kaum elite politik di Tanah Air menghadapi periode paling menyulitkan mereka selama 30 tahun terakhir.

Dengan kata lain, mereka tahu yang mereka hadapi bukan lagi PPP atau Megawati. Tidak juga gabungan dari keduanya. Itu menunjukkan kesadaran tinggi mereka menghadapi realitas politik di lapangan. Sebagian komentator menganggap larangan spanduk Mega-bintang sebagai suatu reaksi yang berlebihan. Analisis di atas menunjukkan kepanikan elite politik Orde Baru sekadar over-reaksi yang tanpa dasar. Di mana pun di dunia, sejarah mengajarkan, melawan kehendak rakyat jelata yang bertiwikrama sama dengan bunuh diri.

*) Antropolog Sosial